

Nomor Register																	
Fakultas	Ps/Bagian	Publikasi	Penulis	Th. Publikasi	Sumber	Sumber Dana	No. Urut Publikasi										
0	1	0	1	1	4	0	1	0	0	0	9	0	4	0	4	4	7



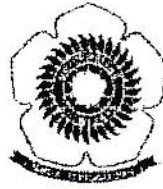
Laporan Penelitian.

**IMPLIKASI EKONOMIS BERLAKUNYA UU NOMOR 18 TAHUN 1997  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TINGKAT II DI SUMATERA SELATAN**

Oleh:  
Zunaidan  
Didik Susetyo

Dibayar Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan  
Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor:002/P2IPY/DIA/VI/1999  
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FEBRUARI 2000



**Laporan Penelitian**

**IMPLIKASI EKONOMIS BERLAKUNYA UU NOMOR 18 TAHUN 1997  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TINGKAT II DI SUMATERA SELATAN**

**Oleh:  
Zunaidah  
Didik Susetyo**

**Dibiayai Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan  
Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor:008//P2IPT/DM/VI/1999  
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FEBRUARI 2000**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

---

1. a. Judul Penelitian : Implikasi Ekonomis Berlakunya UU No. 18/1997  
Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Tingkat II di Propinsi Sumatera Selatan  
b. Bidang Ilmu : Ekonomi  
c. Kategori Penelitian : Mengembangkan IPTEKS
2. Ketua Peneliti :  
a. Nama Lengkap dan gelar : Dra. Zunaidah, M.Si.  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. Golongan Pangkat dan NIP : III/c - Penata dan 132002545  
d. Jabatan Fungsional : Lektor Muda  
e. Jabatan Struktural : Tidak ada  
f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen  
g. Pusat Penelitian : Universitas Sriwijaya
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 orang  
a. Nama Peneliti : Didik Susetyo, S.E., M.Si.
4. Lokasi Penelitian : Sumatera Selatan
5. Kerjasama dgn Institusi Lain :  
a. Nama Institusi : Tidak ada  
b. Alamat : Tidak ada
6. Lama Penelitian : 9 bulan
7. Biaya yang Diperlukan : Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- 

Inderalaya, Februari 2000

Ketua Peneliti,



Dra. Zunaidah, M.Si.  
NIP 132002545



Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian UNSRI

Dr. Ir. Raden H. M. Saleh, M.Sc.  
NIP 130521791

**IMPLIKASI EKONOMIS BERLAKUNYA UU NOMOR 18 TAHUN 1997  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TINGKAT II DI SUMATERA SELATAN**

ZUNAIDAH dan DIDIK SUSETYO

(Tahun 2000, Jumlah 47 halaman)

### Ringkasan

Masalah mendasar dalam penelitian ini adalah berapa besar dampak penghapusan jenis pajak dan retribusi terhadap penerimaan daerah di Sumatera Selatan? Bagaimana potensi sumber dana yang mensubstitusi jenis pajak dan retribusi daerah yang dihapuskan? Bagaimana implikasi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber perimbangan keuangan?

Kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah dampak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan daerah antara lain *comparative budget system* secara vertikal dan horisontal, perbandingan jenis pajak dan retribusi daerah, dan beberapa indikator antara lain derajat sentralisasi fiskal, koefisien ketimpangan penerimaan daerah, dan *bouyancy pajak* daerah. Uji statistik dilakukan dengan uji rata-rata (mean) dan uji-t.

Hasil penelitian antara lain (1) besarnya dampak penghapusan jenis pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan daerah di Sumatera Selatan sebesar 15,10%. Sebanyak enam daerah mengalami dampak relatif lebih besar, sedangkan empat daerah relatif kecil. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel.  $H_0$  ditolak. Artinya rata-rata penerimaan setelah penghapusan pajak lebih kecil dari rata-rata penerimaan sebelum UU baru. Uji 2-tail signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05 berarti pengujian ini signifikan secara statistik. (2) beberapa jenis sumber dana yang mensubstitusi jenis pajak dan retribusi yang dihapuskan memiliki potensi yang masih diragukan. Jenis pajak dan retribusi tersebut dikategorikan sebagai 'minor tax'. (3) Implikasi ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber perimbangan keuangan semakin tinggi. Derajat sentralisasi mengalami perubahan yang sangat lambat sehingga ketergantungan fiskal masih relatif tinggi. Koefisien ketimpangan penerimaan daerah menunjukkan perbaikan tetapi perubahannya juga sangat lambat. Koefisien *bouyancy* pajak dan retribusi bersifat elastis berarti semakin tinggi pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Implikasi kebijakannya adalah (1) Upaya menghindari biaya yang lebih besar atas berlakunya UU Nomor 18 Tahun 1997, pemerintah segera sosialisasi kepada wajib pajak dengan pola intensifikasi secara cermat; (2) pemerintah daerah harus mencari sumber pengganti yang tidak termasuk dalam kategori 'minor tax'; (3) Pemerintah daerah harus berupaya seoptimal mungkin melakukan penggalan PAD agar ketergantungan fiskal semakin turun. Beberapa temuan dari hasil penelitian ini akan lebih bermakna bila ada tindak lanjut penelitian yang lebih mendalam.

Peneliti adalah Dosen Jurusan Manajemen dan Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Inderalaya Palembang.

Kontrak Pelaksanaan Penelitian Nomor: 008/P2IPT/DM/VI/1999 dengan Ditbinlitabmas-Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud Jakarta.

**THE ECONOMIC IMPLICATION OF THE RULE (UU NO. 18/1997)  
TO THE TAX AND RETRIBUTION REVENUES  
OF THE SECOND LEVEL GOVERNMENT  
IN SOUTH SUMATRA PROVINCE**

ZUNAIDAH and DIDIK SUSETYO  
(Year 2000, Amount 47 pages)

**Summary**

The problems in this study are what the effects on deleting some sources of the local tax and retribution to the local revenues in South Sumatera? How the potential kind of the substituted sources the local tax and retribution is ? What the implication of a higher financial dependence to the central funding ?

The theoretical framework to analyze these problems base on a comparative budget system both vertical and horizontal approach, by comparing kind of local tax retribution, coefficient of centralization degree, indicator of local revenue disparity, and *tax bouyancy concept*. The statistical test of mean and student t-test will be done.

The results of this study as follow: (1) the effect of deleting the local tax and retribution approximately 15,10%. Sixth local governments would have average high lost of fund and four local governments remain low. The statistical test reject null-hypothesis and significant. (2) the substituted sources of the local tax and retribution which had been deleted seem likely a minor tax and tend to uncertainty sources; (3) the dependent structure of local financial to the central government is higher. There is an increasing to be better off, however, it was very slowly. Tax bouyancy coefficient is elastic. Since the income per capita rises, the local tax and retribution tend to increased in the certain periode. Moreover, to take for granted of the local tax policy, the local government must have an alternative policy, such as: (1) to do socialization of the rule by implementing intensification pattern in order to increase both coverage ratio and compliance ratio; (2) to avoid managing a minor tax to be aware of an efficient local taxation; (3) to increase the local revenue (PAD) intensively and responsible to manage these programs without exploiting and consider to a universal tax burden principles.

Researchers is lecturer staff of Management and Development Economic Departement,  
Faculty of Economic, University of Sriwijaya, Inderalaya Palembang  
The research contract Number: 008/P2IPT/DM/VI/1999 with Ditbinlitabmas Direktorat  
Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud Jakarta.

## KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan akhir hasil penelitian ini dimaksudkan melengkapi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 008/P2IPT/DM/VI/1999 dengan Direktorat Binlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud. Adapun judul penelitian ini adalah Implikasi Ekonomis Berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini ditekankan pada analisis deskriptif dampak penghapusan jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Fenomena yang terjadi akibat UU baru tersebut diduga menimbulkan inefisiensi sehingga kesenjangan penerimaan antardaerah terlihat. Hal inilah sangat menarik untuk dimunculkan karena sangat terkait dengan prospek perimbangan keuangan dalam rangka otonomi daerah. Beberapa indikator untuk mengetahui dampak tersebut antara lain '*Comparative budget system: vertikal dan horisontal, Derajat sentralisasi fiskal, koefisien variasi, dan bouyancy pajak.* alat analisis menggunakan uji rata-rata dan uji t. Ada telaah prospek dan reformasi kebijakan berkaitan dengan keuangan, terutama pajak dan retribusi daerah.

Sistematika penyajian laporan akhir hasil penelitian ini dibuat dalam 6 (enam) bagian dengan nomor yang berurutan. I Pendahuluan, II Tinjauan Pustaka, III. Tujuan dan Manfaat Penelitian, IV Metode Penelitian, V Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan VI Kesimpulan dan Saran.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan akhir hasil penelitian ini masih membutuhkan masukan dan sumbang saran untuk perbaikan. Untuk maksud tersebut dalam kesempatan ini, saya mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Semoga laporan akhir hasil penelitian ini dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan. Terima kasih.

Inderalaya, Pebruari 2000

Zunaidah & Didik Susetyo

## DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
SUMMARY .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR DIAGRAM .....	viii
I. PENDAHULUAN .....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	10
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	17
IV. METODE PENELITIAN .....	18
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	26
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel	hlm.
5.1. Perbandingan Pajak+Retribusi Daerah terhadap PAD menurut Dati II di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 1995/96-1996/97 .....	27
5.2. Perkiraan Besarnya Penghapusan Pajak+Retribusi Daerah atas berlakunya UU No. 18/1997 menurut Dati II di Sumsel 1996/97 .....	30
5.3. Perbandingan Koefisien Derajat Sentralisasi menurut Dati II di Sumatera Selatan tahun 1983/1984, 1990/1991, 1996/1997 .....	33
5.4. Perbandingan Koefisien Variasi APBD dan PAD menurut Dati II di Sumatera Selatan Tahun 1983/1984 dan 1996/1997 .....	35